



## Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Layanan Umum Universitas X Tahun Anggaran 2021-2023

Ratna Wulandari<sup>1\*</sup>, Lidya Primta Surbakti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. RS Fatmawati, 12450, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: July 19, 2024  
Revised: September 10, 2024  
Available online: October 01, 2024

### KEYWORDS

*Budget Performance Analysis, Variance Analysis, Growth Analysis, Harmony Analysis, Efficiency Analysis*

### CORRESPONDENCE

Phone: +6289663107479  
E-mail: [ratnawulandari@upnvj.ac.id](mailto:ratnawulandari@upnvj.ac.id)

### A B S T R A C T

In managing the budget, it is crucial to conduct budget performance measurement or analysis, which involves assessing and measuring the implementation or realization of the budget. This study presents an original analysis of X University, a State University with BLU (Public Service Agency) status under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. The BLU status provides flexibility in budget management. Therefore, the purpose of this research is to analyze the budget performance of X University as a basis for evaluation to improve quality. In this study, the authors use a descriptive quantitative method, with the research object being the budget performance of X University from 2021 to 2023. The data analysis techniques employed include several expenditure analysis calculations, namely 1) Variance Analysis, 2) Growth Analysis, 3) Compatibility Analysis, and 4) Efficiency Analysis. The Financial Expenditure Performance of X University, as seen from the Variance Analysis, falls into the good category or Favourable Variance. From the Growth Analysis perspective, there was no expenditure growth observed in 2022; however, there was expenditure growth in 2023. The Compatibility Analysis revealed an imbalance between operational and capital expenditures in 2021. In contrast, in 2022 and 2023, the balance between operational and capital expenditures can be considered stable. From the Expenditure Efficiency Analysis, it was found that the budget management of X University was inefficient during the years 2021-2023.

### PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran merupakan proses awal untuk menjalankan kegiatan pada instansi pemerintah, yang berkaitan dengan proses perencanaan berbagai program jangka pendek, dan menerjemahkannya ke dalam rencana keuangan tahunan instansi (Eskandar, 2022). Luaran / output dari proses perencanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa disebut DIPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 tentang petunjuk penyusunan dan Pengesahan, DIPA berfungsi sebagai dasar atau acuan pada pelaksanaan kegiatan satuan kerja, dan juga pencairan dana dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara.

Masing-masing satuan kerja pemerintah memang memiliki kekuasaan untuk mengelola dan menggunakan anggaran yang dimiliki. Namun demikian, tidak menjadikannya kekuasaan mutlak, melainkan harus tetap berpedoman pada tujuan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) suatu instansi yang menaunginya (Palimbong, 2021). Selain itu proses belanja haruslah dapat dikendalikan, dengan demikian mekanisme belanja harus disusun secara efektif dan efisien (Syamsuddin et al., 2022).

Kannapadang (2021) mendefinisikan anggaran sebagai perencanaan kerja yang disusun dengan sistematis dan dinyatakan ke dalam satuan uang untuk periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki fungsi yang penting dalam suatu negara ataupun organisasi, karena anggaran merupakan alat stabilitas, distribusi, dan pengalokasian sumber daya

publik, serta sebagai perencanaan, pengendalian dan penilaian akan kinerja. Oleh karena itu, anggaran dalam pemerintahan menjadi tulang punggung pada penyelenggaraan pemerintahan (Syamsuddin et al., 2022).

Lasupu (2021) menjabarkan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki 4 (empat) tujuan utama, diantaranya: 1) memberikan bantuan kepada organisasi sektor publik untuk bisa mencapai tujuan dan dapat meningkatkan koordinasi di setiap bagian dalam lingkungan; 2) membantu dalam menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam fungsi menyediakan barang dan jasa kepada publik berdasarkan prioritas; 3) memenuhi prioritas belanja pemerintah; dan 4) meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi manajemen sektor publik.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 belanja negara adalah segala pengeluaran negara yang dipergunakan baik itu untuk tujuan pembiayaan belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke pemerintah daerah. Kannapadang (2021) mendefinisikan belanja negara sebagai segala bentuk pengeluaran yang berasal dari rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang tercatat mengurangi saldo anggaran dalam satu periode anggaran. Penggunaan anggaran belanja juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan (Chartady, 2022).

Bila memperhatikan sifat belanja yang mudah untuk dilakukan namun rentan terhadap terjadinya inefisiensi dan penggelapan, maka proses perencanaan, pengendalian dan juga pengawasan terhadap belanja menjadi hal yang sangat penting

untuk dilakukan (Kannapadang, 2021). Karena hal tersebut, dalam mengelola anggaran penting pula dilakukan pengukuran atau analisis kinerja anggaran, yang merupakan proses untuk menilai dan mengukur pelaksanaan atau perealisasi anggaran. Tameon et al (2023) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai suatu sistem keuangan ataupun non keuangan atas suatu pekerjaan yang telah diselesaikan atau hasil yang telah dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses ataupun suatu unit organisasi.

Kinerja itu sendiri merupakan tingkat perealisasi pelaksanaan kegiatan ataupun program yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan juga visi organisasi Tameon (2023). Tingkat keberhasilan kinerja dapat dinilai dengan membandingkan satuan nilai ataupun jumlah anggaran pada rencana dengan realisasi anggaran yang digunakan berdasarkan jenis anggarannya (Chartady, 2022). Secara sederhana kinerja anggaran belanja dinilai baik apabila jumlah realisasi belanjanya lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja yang telah direncanakan.

Analisis kinerja anggaran juga dilakukan sebagai proses pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pada suatu periode. Mahmudi (2016), menjabarkan analisis terhadap kinerja anggaran belanja dapat dilakukan menggunakan beberapa metode perhitungan, yaitu :

1. **Analisis Varians Belanja**, yaitu analisis yang dilakukan terhadap selisih antara jumlah realisasi belanja dengan jumlah anggaran belanja (Mendrofa, 2023). Kriteria kinerja pada analisis varians belanja digambarkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Kriteria Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
<i>Favourable Variance</i> (Baik)	Realisasi Belanja < Anggaran Belanja
<i>Unfavourable Variance</i> (Kurang Baik)	Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Sumber: (Mahmudi, 2016)

2. **Analisis Pertumbuhan Belanja**, yaitu analisis yang dilakukan terhadap kenaikan ataupun penurunan belanja dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan setiap penggunaan anggaran, tanpa memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut bersifat wajar dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak (Palimbong, 2021). Kriteria kinerja pada analisis pertumbuhan belanja digambarkan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Kriteria Pertumbuhan Belanja

Kategori Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: (Mendrofa, 2023)

3. **Analisis Keserasian Belanja**, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar jenis belanja. Proporsi keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah/organisasi dapat memfokuskan anggaran untuk penggunaan kegiatan rutin maupun kegiatan perbaikan secara ideal (Palimbong, 2021). Kriteria kinerja pada analisis keserasian belanja digambarkan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 Kriteria Keserasian Belanja

Kategori Penilaian	Proporsi	Ukuran
Belanja Operasi terhadap Total Belanja	60-90%	Jika dalam rasio yang ditentukan dapat dikatakan seimbang, tetapi jika lebih besar atau kurang dari rasio yang ditentukan, maka dikatakan terjadi ketidakseimbangan.
Belanja Modal terhadap Total Belanja	5-20%	

Sumber: (Mendrofa, 2023)

4. **Analisis Efisiensi Belanja**, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran. Kriteria kinerja pada analisis efisiensi belanja digambarkan pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4 Analisis Efisiensi Belanja

Kategori	Ukuran
Sangat Efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup Efisien	80% - 90%
Kurang Efisien	90% - 100%
Tidak Efisien	> 100%

Sumber: (Mendrofa, 2023)

Kategori ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 terkait kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja, yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Apabila persentase realisasi melebihi 100%, maka anggaran tidak efisien;
2. Apabila persentase realisasi antara 90%-100%, maka anggaran kurang efisien;
3. Apabila persentase realisasi antara 80%-90%, maka anggaran cukup efisien;
4. Apabila persentase realisasi antara 60%-80%, maka anggaran sudah efisien.
5. Apabila persentase realisasi dibawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat efisien.

Empat alat analisis tersebut digunakan oleh Kannapadang (2021) dalam penelitiannya untuk menilai kinerja anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan analisis varians kinerja anggaran BPS Kabupaten Tana Toraja dinilai baik karena realisasi belanja tidak melebihi rencana anggaran. Bila didasarkan pada analisis pertumbuhan menunjukkan terjadinya pertumbuhan belanja yang positif. Namun jika didasarkan pada perhitungan analisis keserasian, menunjukkan terjadi ketidakseimbangan belanja yang selalu lebih berfokus kepada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Sedangkan secara umum BPS tersebut telah melakukan efisiensi belanja pada tahun 2018-2020.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Syamsuddin (2022) untuk mengukur kinerja anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2020. Penelitian deskriptif kuantitatif tersebut menghasilkan penilaian kinerja anggaran belanja yang telah dilaksanakan dengan baik dan efisien. Akan tetapi pada keserasian belanja, KPU Provinsi Sulawesi Barat dianggap masih perlu meningkatkan belanja modalnya.

Selanjutnya, Mendrofa (2023) dalam penelitian kuantitatifnya melakukan analisis terhadap kinerja anggaran belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016-2020. Penelitian tersebut menemukan

bahwa varians belanja telah dilakukan secara baik, dengan pertumbuhan di delapan kabupaten menunjukkan hasil yang positif dan keserasian belanjanya yang seimbang. Namun, analisis efisiensi belanja menunjukkan hasil yang beragam dan cenderung kurang efisien.

Penelitian serupa lainnya juga dilakukan oleh Palimbong (2021) terhadap kinerja anggaran KPU Kabupaten Tana Toraja. Analisis varians menunjukkan hasil yang baik, dengan pertumbuhan belanja yang terjadi selama periode tahun anggaran 2017-2018, dan keserasian belanja yang belum seimbang karena lebih didominasi oleh pengalokasian belanja modal. Namun secara keseluruhan pada periode tersebut KPU Kabupaten Tanah Toraja telah menjalankan belanja dengan efisien.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penulis menilai empat metode tersebut relevan untuk menganalisis berbagai aspek kinerja anggaran pada sektor publik. Analisis varians dan efisiensi belanja dapat memberikan gambaran terkait penyimpangan antara rencana anggaran dan realisasi, yang penting untuk mengidentifikasi efisiensi alokasi sumber daya. Analisis pertumbuhan belanja memberi gambaran perkembangan pengeluaran secara komperatif untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan anggaran yang diberlakukan (Liyani et al., 2023). Sedangkan, analisis keserasian belanja memberikan gambaran keseimbangan pada setiap komponen pengeluaran atau belanja, untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya telah sejalan dengan kebijakan prioritas strategis.

Karena itu, objek dalam penelitian ini adalah Universitas X, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dibawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum ialah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menyediakan barang ataupun jasa tanpa berorientasi pada keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan prinsip produktivitas. Badan Layanan Umum memiliki keutamaan fleksibilitas dalam pengelolaan anggarannya (Alifa, 2023). Dengan demikian Universitas dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran dengan lebih leluasa dibandingkan dengan universitas lain yang masih berstatus satuan kerja pemerintah (Satker).

Dengan pengelolaan yang lebih fleksibel sering menjadikan rentan akan perilaku inefisiensi dalam pengelolaan anggarannya. Namun demikian, fleksibilitas pengelolaan anggaran tersebut harus tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan ambang batas yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), serta didasarkan pula pada praktek bisnis yang sehat (UU Nomor 1 Tahun 2004). Didasarkan pada hal tersebutlah, penting bagi Universitas X dalam melakukan analisis terhadap kinerja anggaran belanjanya sebagai dasar evaluasi agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan, dengan tujuan akhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Universitas X sebagai organisasi sektor publik merupakan layanan masyarakat, legitimasi diperoleh melalui akuntabilitas vertikal dengan pengesahan negara dan akuntabilitas secara horizontal melalui pengakuan dari masyarakat. Teori

penetapan tujuan berasumsi terdapat hubungan langsung antara tujuan yang terukur dan spesifik dengan kinerja. Teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa individu yang diberi tujuan yang sulit dan spesifik dan sulit namun dapat dicapai akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menerima tujuan yang kurang spesifik dan lebih mudah atau tidak ada tujuan sama sekali. Dalam *goal setting theory* terdapat hubungan yang berbanding lurus antara tujuan yang spesifik dan sulit dengan kinerja (Locke dan Latham, 1968). Menurut Mardiasmo (2002) bahwa *New Public Management* menimbulkan beragam konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk pemangkasan biaya (*cost cutting*), melakukan efisiensi dan kompetisi tender. Dengan kata lain bahwa dengan melakukan analisis kinerja dengan efektif akan menjadikan suatu organisasi BLU dapat mencapai efisiensi.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis kinerja atas anggaran belanja pada Universitas X dalam periode anggaran 2021-2023. Beberapa masalah utama yang penulis angkat dalam penelitian ini, diantaranya 1) Apakah terdapat pertumbuhan belanja pada periode anggaran 2021-2023 di Universitas X? 2) Apakah terdapat keserasian belanja pada periode anggaran 2021-2023 di Universitas X? serta 3) Apakah belanja dalam periode anggaran 2021-2023 di Universitas X terdapat efisiensi?

Penelitian ini penting untuk dilakukan dan berkontribusi dalam memberikan literatur terkait evaluasi kinerja anggaran di institusi pendidikan tinggi, khususnya pada PTN BLU. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran dalam berbagai aspek terkait kinerja pengelolaan anggaran di Universitas X, dan menyajikan data empiris sebagai dasar bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan tata Kelola di bidang keuangan sehingga mendukung tercapainya kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

**METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan objek analisis dalam penelitian ini yaitu Universitas X, sedangkan objeknya adalah kinerja anggaran tahun 2021 – 2023. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari dokumen realisasi anggaran Universitas X tahun 2021-2023, dan juga literatur lain yang mendukung penelitian ini. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis kinerja belanja Universitas X diantaranya :

1. Analisis Varians Belanja

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun}_{t-1} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-1} - \text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-2}}{\text{Realisasi Belanja Tahun}_{t-2}} \times 100\%$$

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis belanja modal terhadap total belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4. Analisis Efisiensi Belanja

$$\frac{\text{Rasio Efisiensi Belanja} \cdot \text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang disajikan pada Tabel 5 terdapat data anggaran belanja dan realisasi belanja Universitas X berdasarkan jenis belanja periode tahun 2021-2023, sebagai berikut.

Tabel 5.1 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Universitas X Tahun 2021

Jenis Belanja	Tahun 2021	
	Pagu Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	32.478.365.000	31.294.240.280
Belanja Barang	150.898.866.000	141.057.017.936
Belanja Modal	129.035.400.000	128.172.354.259
<b>Jumlah</b>	<b>312.412.631.000</b>	<b>300.523.612.475</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 5.2 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Universitas X Tahun 2022

Jenis Belanja	Tahun 2022	
	Pagu Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	50.967.886.000	50.353.507.698
Belanja Barang	189.789.158.000	179.662.393.465
Belanja Modal	55.502.826.000	53.208.487.464
<b>Jumlah</b>	<b>296.259.870.000</b>	<b>283.224.388.627</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 5.3 Data Anggaran dan Realisasi Belanja Universitas X Tahun 2023

Jenis Belanja	Tahun 2023	
	Pagu Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	53.465.953.000	52.810.070.266
Belanja Barang	209.616.489.000	197.447.796.777
Belanja Modal	53.716.498.000	45.898.800.746
<b>Jumlah</b>	<b>316.798.940.000</b>	<b>296.156.667.789</b>

Sumber: Data diolah, 2024

1. Analisis Varians Belanja

Berikut disajikan hasil perhitungan varian belanja Universitas X Tahun 2021-2023:

Tabel 6. Analisis Varians Belanja Universitas X Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja	Kategori
2021	312.412.631.000	300.523.612.475	-11.889.018.525	Favourable Variance
2022	296.259.870.000	283.224.388.627	-13.035.481.373	Favourable Variance
2023	316.798.940.000	296.156.667.789	-20.642.272.211	Favourable Variance

Sumber: Data diolah, 2024

Jika dilihat pada Tabel 6, varians Universitas X pada tahun 2021 adalah sebesar Rp11.889.018.525, varians pada tahun 2022 terdapat selisih lebih anggaran atau efisiensi sebesar Rp13.035.481.373, dan varians pada tahun 2023 adalah terdapat efisiensi belanja sebesar Rp20.642.272.211. Hasil minus menandakan bahwa jumlah penggunaan anggaran tidaklah

melebihi jumlah anggaran yang telah direncanakan atau efisiensi.. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir Universitas X memiliki varians atau selisih belanja yang baik atau dalam kategori *Favourable Variance* yang dicerminkan dari jumlah realisasi belanja yang lebih kecil daripada anggaran belanja, dengan kata lain penggunaan anggaran belanja Universitas X selama 3 tahun dilakukan secara efisiensi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Palimbong (2021) yang menyatakan bahwa anggaran belanja dinilai baik jika realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Dari Tabel 7 disajikan hasil perhitungan pertumbuhan belanja Universitas X selama tahun 2021-2022:

Tabel 7 Analisis Pertumbuhan Belanja Universitas X Tahun 2021-2022

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2021	Pertumbuhan/ Penurunan Belanja	Persentase (%)
Pegawai	50.353.507.698	31.294.240.280	19.059.267.418	61%
Barang	179.662.393.465	141.057.017.936	38.605.375.529	27%
Modal	53.208.487.464	128.172.354.259	-74.963.866.795	-58%
<b>Total Belanja</b>	<b>283.224.388.627</b>	<b>300.523.612.475</b>	<b>-17.299.223.848</b>	<b>-6%</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas yang disajikan pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa untuk belanja pegawai terdapat pertumbuhan sebesar 61% (dari jumlah anggaran sebesar Rp31.294.240.280 tahun 2021 menjadi Rp50.353.507.698 di tahun 2022) dan juga pertumbuhan belanja barang sejumlah 27% (belanja barang tahun 2021 sebesar 141.057.017.936 menjadi sebesar Rp179.662.393.465 dari untuk tahun tahun 2022. Sedangkan untuk belanja modal terdapat pertumbuhan negative sebesar 58% (anggaran barang modal 2021 sebesar Rp128.172.354.259 menjadi sebesar Rp53.208.487.464 ditahun 2022).

Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 Universitas X mendapatkan hibah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang termasuk belanja modal, sehingga belanja modal tahun 2021 peningkatan yang luar biasa.

Sedangkan hasil perhitungan pertumbuhan belanja Universitas X Tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Analisis Pertumbuhan Belanja Universitas X Tahun 2022-2023

Jenis Belanja	Realisasi Belanja Tahun 2023	Realisasi Belanja Tahun 2022	Pertumbuhan/ Penurunan Belanja	Persentase (%)
Pegawai	52.810.070.266	50.353.507.698	2.456.562.568	5%
Barang	197.447.796.777	179.662.393.465	17.785.403.312	10%
Modal	45.898.800.746	53.208.487.464	-7.309.686.718	-14%
<b>Total Belanja</b>	<b>296.156.667.789</b>	<b>283.224.388.627</b>	<b>12.932.279.162</b>	<b>5%</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan yang dijabarkan pada Tabel 8, dapat dijelaskan bahwa pada belanja pegawai terdapat pertumbuhan sebesar 5% (dari anggaran belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp50.353.507.698 menjadi Rp2.810.070.266) diikuti oleh pertumbuhan positif belanja barang sejumlah 10% (belanja barang sebesar Rp179.662.393.465 di tahun 2022 menjadi sebesar Rp197.447.796.777 di tahun 2023. Sedangkan

untuk belanja modal terdapat pertumbuhan negatif sebesar 14% dengan penjelasan anggaran belanja modal 2022 sebesar Rp53.208.487.464 dan ditahun 2023 menjadi Rp45.898.800.746.

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa tidak semua jenis belanja mengalami pertumbuhan positif tetapi ada belanja modal yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif ini terjadi karena prioritas pemenuhan kebutuhan operasional pada tahun 2023 dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Universitas. Hasil ini sesuai dengan Soraida (2021) yang menyatakan bahwa kenaikan total belanja yang cenderung memiliki nilai positif pada setiap tahunnya menunjukkan bahwa kinerja penyusunan anggaran mengalami perkembangan. Namun, pertumbuhan pada jenis anggaran belanja tertentu dapat bernilai negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang berdasarkan kebijakan belanja tersebut tidak menjadi prioritas pada tahun anggaran tersebut.

3. Analisis Keserasian Belanja

Terdapat dua perhitungan pada analisis keserasian belanja, yaitu analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja. Perhitungan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja.

Tabel 9 Analisis Belanja Operasi Universitas X Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Total Belanja	Rasio Belanja Operasi (%)	Kategori
2021	172.351.258.216	300.523.612.475	57%	Tidak Seimbang
2022	230.015.901.163	283.224.388.627	81%	Seimbang
2023	250.257.867.043	296.156.667.789	85%	Seimbang

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 10 Analisis Belanja Modal Universitas X Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Total Belanja	Rasio Belanja Modal (%)	Kategori
2021	128.172.354.259	300.523.612.475	43%	Tidak Seimbang
2022	53.208.487.464	283.224.388.627	19%	Seimbang
2023	45.898.800.746	296.156.667.789	15%	Seimbang

Sumber: Data diolah, 2024

Pada umumnya persentase jumlah belanja operasi akan mendominasi jumlah total belanja, yaitu antara 60-90 persen. Sedangkan persentase jumlah belanja modal idealnya adalah sebesar 5-20 persen (Soraida, 2021). Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10, terlihat terjadi ketidak seimbangan belanja antara belanja operasi dan belanja modal selama tahun 2021, dengan presentase belanja operasi hanya sebesar 57% dari total belanja, sedangkan tercatat belanja modal mencapai 43% atau sebesar Rp128.172.354.259 dari total belanja Rp300.523.612.475.

Hal tersebut terjadi berkaitan dengan adanya hibah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memang diperuntukkan untuk keperluan belanja modal di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 keserasian antara belanja operasi dan belanja modal dapat dikatakan telah seimbang, karena pada tahun 2022 jumlah belanja operasi Universitas X meningkat menjadi sebesar 81% dari total belanja, dan belanja modal sebesar 19% dari total belanja. Tidak jauh berbeda di tahun 2023, jumlah belanja operasi Universitas X adalah sebesar 85%

dari total belanja, sedangkan belanja modal sebesar 15% dari total belanja.

Secara garis besar belanja operasional Universitas X selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami kenaikan, sebaliknya belanja modal yang mengalami penurunan. Hal tersebut karena Universitas X sedang berfokus untuk mengembangkan universitas dengan pemenuhan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas. Sehingga perencanaan anggaran dan perealisasi kegiatan lebih diutamakan kepada kegiatan yang mendukung tercapainya IKU Universitas.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Berikut disajikan hasil perhitungan terhadap efisiensi belanja Universitas X Tahun 2021-2023:

Tabel 11. Analisis Efisiensi Belanja Universitas X Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kategori
2021	312.412.631.000	300.523.612.475	96,19%	Kurang Efisien
2022	296.259.870.000	283.224.388.627	95,60%	Kurang Efisien
2023	316.798.940.000	296.156.667.789	93,48%	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 11 didapati bahwa selama tahun 2021-2023 pengelolaan anggaran Universitas X kurang efisien, dikarenakan realisasi belanjanya selalu melebihi 90% dari anggaran belanja yang telah direncanakan. Ini berkaitan dengan fungsi rasio efisiensi belanja yang digunakan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan instansi, yaitu dikatakan anggaran sudah efisien jika sisa anggaran pada persentase realisasi antara 60%-80% (Lumaku & Nindiasari, 2023).

Namun persentase yang telah dicapai tersebut telah mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Mengingat bahwa Universitas X merupakan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka dalam pelaksanaan kegiatan anggarannya Universitas X perlu mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022, telah diatur penyerapan anggaran minimum instansi untuk masing-masing jenis belanja, yaitu: Belanja Pegawai sebesar 95%, Belanja Barang 90%, Belanja Modal 90% dan Belanja Bansos sebesar 95%. Hal tersebutlah yang menjadi dasar realisasi anggaran pada Universitas X, sehingga selama tahun 2021-2023 Universitas X telah mencatat realisasi belanja diatas 90%. Dapat disimpulkan bahwa, dari hasil analisis efisiensi belanja dapat dikatakan kurang seimbang walaupun dari sisi kinerja serapan anggaran yang merupakan salah satu pengukuran kinerjanya di BLU bahwa Universitas X mempunyai kinerja keuangan yang baik sesuai aturan peraturan Dirjen Perbendaharaan..

## KESIMPULAN

Didasarkan pada hasil analisis data dan penjabaran pada data realisasi belanja Universitas X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja pada Universitas selama tahun 2021-2023 dapat dikatakan efisien hal ini ditunjukkan dengan jumlah realisasi belanja yang lebih kecil daripada anggaran belanja.
2. Pertumbuhan belanja secara keseluruhan dari tahun 2022 ke tahun 2023, Namun terjadi pertumbuhan belanja yang negatif terjadi dari tahun 2021 ke 2022 dengan adanya penurunan jumlah realisasi belanja dibawah ambang batas 6% terutama pada belanja modal.
3. Keserasian Belanja terjadi ketidak seimbangan antara belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2021, namun demikian, terdapat keserasian belanja pada tahun 2022 dan 2023
4. Kinerja Keuangan dari analisis efisiensi belanja ditemukan bahwa selama tahun 2021-2023 pengelolaan anggaran Universitas X kurang efisien,

Berdasarkan hasil Analisis yang telah dilakukan terhadap anggaran belanja dan realisasi belanja Universitas X tahun 2021-2023, beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya:

1. Untuk Universitas X diharapkan menyesuaikan anggaran belanja sesuai kebutuhannya sehingga dapat dialokasikan sesuai realisasi sehingga diharapkan untuk tahun yang akan datang terjadi efisiensi belanja.
2. Agar Universitas dalam menyusun anggaran fokus sesuai kebutuhan dan anggaran yang sudah dibuat harus direalisasikan dengan evaluasi secara periode sehingga kesimbangan belanja dapat dicapai dan kinerja keuangan menjadi baik.

Implikasi dari penelitian ini untuk Universitas X dalam penyusunan anggaran kedepan lebih spesifik dengan menganalisis terlebih dahulu setiap rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan tahun selanjutnya agar terjadi efisiensi belanja dan kesimbangan belanja. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya: melakukan penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif yang tanpa menyertakan wawancara yang dirasa seharusnya dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang faktor non finansial, dan penelitian ini hanya melakukan untuk satu PTN saja. Sehingga untuk Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih banyak PTN BLU yang lain, hal ini akan lebih menarik karena terdapat budaya yang berbeda yang dapat dilihat hasil yang beragam.

## REFERENSI

- Alifa, H. N. dan Sulaeman, A., (2023). Perguruan Tinggi Negeri BLU di Indonesia: Pengelolaan Anggaran, Karakteristik, dan Peningkatan Kinerja. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 401-416.
- Chartady, R., Vanisa Meifari, Tiara Wulandari, R. U. (2022). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 17(1978), 228-236.
- Eskandar. (2022). Efektivitas Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Anggaran Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 46-61.
- Kannapadang, D. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kabupaten Tana Toraja. 2(2), 1-10.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433-1441.
- Liyani, Y., Tiska Luthfita Desanti Putri Suharto, V., & Wira Bharata3, R. (2023). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(3), 520-527.
- Locke E.A. dan Latham G.P. 2006. New directions in goal setting theory. *Current Directions in Psychological Science*.
- Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran dinas kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2017-2021. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 207-211.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmoo 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*
- Mendrofa, D. Y., & Nur, M. A. (2023). Analisis Anggaran Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2016-2020. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 1058.
- Palimbong, S. M. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT) Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Toraja*. 2(2), 207-226.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022.
- Soraida, Septa. (2021). Analisis Belanja Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 54-61.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME : Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Tameon, A. F., Rafael, S. J. M., & Ga, L. L. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode Value for Money Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Perode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 11(1), 40-50
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022.